

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya, yang artinya Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan kedaulatan yang penuh kepada rakyatnya, berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, mulai dari menentukan kebijakan sampai dengan menentukan para pemimpinnya. Salah satu bentuk demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu di Indonesia mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan para anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada tahun 2018 ini Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau bisa disingkat Pilkada atau Pemilukada. Kegiatan Pilkada ini dilakukan di Indonesia setiap 5 tahun sekali untuk mementukan para pemimpin daerah mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten dan kota. Para pemimpin daerah tersebut mencakup kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk provinsi kepala daerah dan wakil kepala daerah disebut Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kegiatan Pilkada berlandaskan pada Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2004 pasal 24 ayat 5 tentang pemerintah daerah. Merujuk pada Undang-Undang tersebut dilakukanlah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh masyarakat daerah tersebut, sebagai bentuk implementasi negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Sejak saat itulah bukan hanya pemimpin negara dan para anggota dewan yang di pilih langsung oleh rakyat, akan tetapi setiap kepala pemerintah daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pilkada pertama dilakukan di Indonesia pada tahun 2005, terdapat 211 kursi yang diperebutkan untuk bisa menjadi kepala pemerintah daerah, saat itu para pasangan calon pemimpin daerah merupakan para pasangan calon yang diusulkan dari satu partai politik atau gabungan dari partai politik. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, para calon pemimpin daerah bukan lagi hanya para calon pasangan yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik tetapi juga bisa dari calon perseorangan atau independen yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini, tentu saja membuat semakin ketatnya persaingan dalam Pilkada, bukan hanya partai politik saja yang bersaing untuk memenangkan perebutan kursi sebagai pemimpin daerah, akan tetapi para calon pasangan independen atau perseorangan juga ikut bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat daerah tertentu dalam kegiatan pilkada. Kepercayaan dari masyarakat inilah yang membuat calon

pemimpin daerah yang mengikuti pilkada bisa mendapatkan kursi kepemimpinan di suatu daerah, melalui suara yang diberikan masyarakat daerah tersebut dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah.

Semakin ketatnya persaingan dalam Pilkada membuat partai politik/gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon disetiap daerah pemilihan akan bekerja keras dalam melakukan kampanye politik untuk meyakinkan masyarakat daerah pemilihan agar memilih pasangan calon yang diusungkan. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan dari rakyat (Arifin, 2003:83).

Salah satu jenis kampanye politik yang selalu digunakan adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang di tujukan kepada massa (orang banyak) persuasi kepada massa itu dilakukan, baik melalui hubungan tatap muka maupun menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, film spanduk, baliho, poster, volder serta selebaran atau medium interaktif melalui komputer (*internet*) (Arifin,2003:85). Pemilihan media massa yang dilakukan partai politik dengan tepat dalam Pilkada, sangat berpengaruh terhadap dukungan yang akan di peroleh oleh pasangan calon yang diusungnya. Peran media massa sangat besar dalam menyampaikan informasi politik karena media massa mempunyai beberapa keunggulan, antara lain media massa memiliki jangkauan luas dalam menyampaikan pesan kepada khalayak dan berpengaruh langsung serta segera terhadap penerima pesan (Hikmat, 2010:64).

Serangkaian komunikasi politik yang akan di gunakan partai politik/gabungan partai politik untuk memenangkan pasangan calon yang di usung dalam Pilkada, tidak lepas dari peran humas dalam berkomunikasi baik dengan internal maupun dengan eksternal, humas sebagai jembatan komunikasi harus bisa mendukung partai politik yang telah mengusung pasangan calonnya disetiap daerah.

Partai politik menjadi kelompok atau organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui para anggota partai politik yang akan duduk dalam pemerintahan, baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Dengan harapan pemerintahan dapat berjalan sesuai yang di harapkan oleh masyarakat.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan sebuah partai yang berdiri pada masa reformasi tepatnya pada bulan agustus tahun 1998, PAN mulai menjadi peserta pemilu pada tahun setelahnya yaitu tahun 1999 sampai dengan saat ini (Nainggolan dkk, 2016:164). Walaupun sudah 20 tahun partai PAN menjadi partai politik di indonesia, keeksistensian partai tersebut masih bertahan sampai sekarang, terbukti dengan banyaknya partai baru yang hadir di Indonesia, PAN masih menjadi partai yang dipercaya oleh sejumlah masyarakat untuk menjalankan amanah rakyat dalam pemerintah sebagai anggota lembaga legislatif disetiap Pemilihan Umum.

Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pusat kehumasan PAN memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi

partainya di dalam perpolitikan Indonesia, bukan hanya di wilayah pusat Humas DPP PAN juga harus menjaga nama baik partainya di setiap daerah di Indonesia, serta mempertahankan dan menambah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai PAN.

Pilkada pada tahun ini terdapat 171 kursi kepemimpinan daerah yang diperebutkan mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Ada 17 kursi untuk Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Setiap calon pemimpin daerah yang diusung partai politik, gabungan partai politik dan calon perseorangan atau independen akan bersaing dalam Pilkada serentak 2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis daftar pasangan calon disetiap daerah pemilihan dan dari mana saja pasangan calon berasal, mulai dari pasangan calon yang berasal dari satu partai, gabungan partai dan pasangan calon perseorangan/independen. Dari rilis yang ditampilkan oleh KPU ada 568 pasangan calon yang akan ikut berkontribusi dalam persaingan di Pilkada serentak 2018. Partai PAN telah mengusung para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap daerah pemilihan, baik pasangan calon yang berasal dari kader PAN ataupun pasangan calon yang berasal dari partai lain yang didukung partai PAN. Total dari 171 daerah yang diperebutkan dalam Pilkada tahun ini, partai PAN telah mengungusung 150 pasangan calon yang akan didukung dan dari total 150 jumlah pasangan calon yang didukung partai PAN, terdapat 20 pasangan calon yang berasal dari internal partai yang merupakan kader PAN. (<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/tahapPenetapan>).

Untuk memenangkan pasangan calon yang diusungkan pada pilkada 2018 ini, PAN tentunya melakukan kampanye politik di setiap daerah pemilihan dan memilih media politik yang akan digunakan dalam menyampaikan program kerja jika terpilih dalam Pilkada tahun ini, semua kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang akan dilakukan partai PAN untuk meperoleh suara terbanyak di setiap daerah yang mengusungkan pasangan calonnya dalam Pilkada 2018. Dalam komunikasi politik yang dilakukan PAN tentunya tidak terlepas dari peran humas sebagai penghubungan antara partai politik dengan masyarakat, menarik melihat proses komunikasi humas PAN di internal maupun dengan eksternal sebagai usaha memenangkan para pasangan calon yang didukungnya.

Humas DPP PAN sebagai pusat kehumasan partai PAN tentunya akan melakukan segenap cara untuk memenangkan setiap pasangan calon yang diusungkan oleh partainya disetiap daerah pemilihan. Penulis memilih Partai Amanat Nasional dalam penelitian ini karena, PAN merupakan partai yang sudah cukup lama eksis di indonesia dan masih bertahan diantara banyaknya partai-partai baru yang hadir di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengamati proses komunikasi yang terjadi sebagai upaya humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) dalam usaha memenangkan para pasangan calon yang diusung PAN yang akan bersaing di pilkada serentak 2018, Penulis tertarik karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Humas Partai Amanat Nasional sebagai pusat kehumasan partai, oleh karna itu penulis memilih judul “Dinamika

Komunikasi Humas DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Memenangkan Pasangan Calon Pada Pilkada Serentak 2018”.

Pentingnya penelitian ini untuk mengetahui peran yang dilakukan bagian humas dalam partai politik, khususnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai usaha mengalirkan komunikasi yang baik, didalam internal partai maupun eksternal untuk memenangkan pasangan calon yang telah diusungkan pada Pilkada serentak 2018.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dinamika komunikasi Humas DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi dalam usaha memenangkan pasangan calon pada Pilkada serentak 2018.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan penulis pada latar belakang penelitian, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika komunikasi Humas DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan pasangan calon pada Pilkada serentak 2018?
2. Program-program apa saja yang dilakukan oleh Humas DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menggunakan media politik untuk memenangkan pasangan calon pada Pilkada serentak 2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika komunikasi Humas DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan pasangan calon pada Pilkada serentak 2018.
2. Untuk mengetahui program-program apa saja yang dilakukan oleh Humas DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menggunakan media politik untuk memenangkan pasangan calon pada Pilkada serentak 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis, khususnya dalam ilmu komunikasi dibidang kehumasan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), Universitas Satya Negara Indonesia yang sedang melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan Bagi Humas Partai Amanat Nasional dalam melakukan perbaikan-perbaikan dengan keterkaitannya dalam pilkada serentak 2018 dan pada pilkada serentak ditahun-tahun yang akan datang.